

# TANTANGAN DAN PELUANG BIMBINGAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN INKLUSI

Putri Ramadhani Anwar<sup>1</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2</sup>, Nur Anisya Afrianti  
Yusuf<sup>3</sup>, Nurfani<sup>4</sup>, Ahmad Yusuf<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Bimbingan dan Konseling, STKIP Andi Mattappa, Indonesia

Email:<sup>1</sup> [pr8657839@gmail.com](mailto:pr8657839@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh konselor sekolah dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan literatur review. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah dibaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pengorganisasian data (*organize*), penyusunan dan penggabungan informasi (*synthesize*), serta pengidentifikasian temuan utama (*identify*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan khusus bagi konselor untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Sebagian besar konselor belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan, karakteristik, dan pendekatan yang sesuai untuk mendukung siswa inklusi. Keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas fisik, alat bantu belajar, dan teknologi asistif, serta adanya stigma negatif terhadap siswa berkebutuhan khusus, juga menjadi hambatan signifikan.

**Kata Kunci:** Bimbingan Konseling; Kolaborasi; Pendidikan Inklusi; Siswa Berkebutuhan Khusus; Tantangan.

## Pendahuluan

Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mendapatkan layanan yang sama, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda atau memiliki kebutuhan khusus di Indonesia, keragaman siswa tidak hanya terlibat dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Tetapi juga mencakup perbedaan kondisi fisik, kemampuan akademik, serta tantangan sosial dan emosional yang dihadapi oleh setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan BK yang inklusif tidak hanya berfokus pada siswa yang mengalami kesulitan belajar, tetapi juga mencakup siswa dengan latar belakang keluarga yang berbeda, mereka yang mengalami diskriminasi, maupun siswa dengan kebutuhan khusus (*special needs*) yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam layanan BK (Indayani, 2020).

Namun, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah tantangan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling yang efektif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti keterbatasan keterampilan dan pelatihan konselor, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusi di kalangan guru dan orang tua, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran bimbingan konseling di sekolah inklusi. Seringkali, konselor di sekolah inklusi menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan pendekatan dan metode konseling yang

dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa, baik yang memiliki disabilitas maupun yang tidak (Dewi, 2024).

Di sisi lain, meskipun terdapat tantangan yang cukup besar, pendidikan inklusi juga menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan bimbingan konseling. Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar dapat memperkaya pendekatan yang diterapkan oleh konselor. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan layanan bimbingan konseling dan memberikan dukungan yang lebih efektif bagi siswa (Risalul Ummah, 2023).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur review. Sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik berpikir kritis dan metode pembelajaran diskusi kelompok. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel-artikel terkait melalui Google Scholar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengorganisasian data (organize), penyusunan dan penggabungan informasi (synthesize), serta pengidentifikasian temuan utama (identify). Pada tahap pertama, Pada tahap ini, peneliti mengorganisasi dan meninjau literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Proses ini melibatkan pencarian ide, tujuan, dan kesimpulan dari berbagai literatur dengan cara membaca bagian abstrak, pendahuluan, metode, serta pembahasan. Selain itu, literatur dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah analisis. Kedua, Synthesize bertujuan untuk mengintegrasikan hasil pengorganisasian literatur menjadi sebuah ringkasan yang utuh dan koheren. Peneliti mencari hubungan antar-literatur untuk menciptakan satu kesatuan yang padu. Ketiga, peneliti mengidentifikasi isu-isu penting atau kontroversial yang terdapat dalam literatur. Isu-isu tersebut dianggap menarik untuk dibahas lebih mendalam guna menghasilkan tulisan yang informatif dan relevan dengan perkembangan terkini.

## Hasil

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan bimbingan konseling (BK) pada pendidikan inklusi adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan konselor dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Banyak konselor belum memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik, kebutuhan, serta pendekatan yang tepat untuk mendukung perkembangan peserta didik inklusi. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya pelatihan khusus atau program pengembangan profesional. Menurut Gysbers & Henderson (2012), kompetensi konselor yang mencakup kemampuan memahami kebutuhan individual dan merancang intervensi berbasis bukti sangat penting dalam mendukung efektivitas layanan BK.

Selain itu, sebagian besar kurikulum pendidikan konseling di Indonesia masih belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pendidikan inklusi. Akibatnya, konselor sering menghadapi kesulitan dalam merancang program atau strategi konseling yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik yang beragam. Keterbatasan keterampilan teknis, seperti penggunaan alat bantu belajar, teknologi asistif, serta metode komunikasi alternatif, turut menjadi hambatan dalam mendukung

keberhasilan pendidikan inklusi. Friend dan Bursuck (2019) menekankan bahwa integrasi pelatihan berbasis inklusi dalam kurikulum pendidikan konselor merupakan langkah esensial untuk membangun kompetensi profesional.

Tantangan lain yang ditemukan adalah kurangnya sumber daya pendukung, seperti tenaga konselor profesional, fasilitas fisik, media pendukung, serta anggaran khusus. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah inklusi tidak memiliki ruang konseling yang ramah disabilitas, alat bantu belajar, atau teknologi berbasis inklusi yang dapat membantu proses konseling. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas layanan BK, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Menurut Salvia, Ysseldyke, dan Witmer (2012), fasilitas yang memadai, termasuk aksesibilitas fisik dan alat bantu pendidikan, memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus.

Stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih menjadi hambatan signifikan dalam pendidikan inklusi. Banyak siswa menghadapi diskriminasi dari teman sebaya maupun lingkungan sekolah. Diskriminasi ini dapat berupa pengucilan dari aktivitas kelompok, bullying, atau kurangnya akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan. Oliver (1990) dalam teorinya tentang disabilitas sosial menekankan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah hasil konstruksi sosial yang memerlukan perubahan paradigma melalui edukasi dan advokasi.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusi. Beberapa kebijakan, seperti alokasi anggaran untuk pelatihan konselor dan pengadaan fasilitas, dapat membantu mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, evaluasi dan pemantauan oleh sekolah terhadap proses belajar inklusif juga menjadi bagian dari solusi. Menurut Ainscow, Booth, dan Dyson (2006), kebijakan inklusi yang efektif harus didukung oleh pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Temuan lain menunjukkan bahwa kolaborasi antara konselor, guru, psikolog, dan profesional lainnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Kolaborasi ini memungkinkan perancangan strategi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Bronfenbrenner (1979) melalui teorinya tentang ekologi perkembangan manusia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sistem dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan khusus menjadi tantangan utama bagi konselor. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, penggunaan teknologi asistif, serta metode komunikasi alternatif. Gysbers & Henderson (2012) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi konselor harus berfokus pada pendekatan berbasis solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pendidikan inklusi. Selain itu, integrasi

aspek inklusi dalam kurikulum pendidikan konselor perlu ditingkatkan sebagaimana disarankan oleh Friend dan Bursuck (2019).

Sumber Daya dan Fasilitas Keterbatasan fasilitas dan sumber daya memengaruhi kualitas layanan BK dalam pendidikan inklusi. Oleh karena itu, pemerintah dan sekolah perlu berinvestasi dalam penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti ruang konseling yang aksesibel dan alat bantu belajar. Dukungan anggaran untuk pelatihan konselor dan pengadaan alat pendukung juga menjadi hal yang krusial. Salvia, Ysseldyke, dan Witmer (2012) menekankan bahwa investasi pada fasilitas pendidikan yang inklusif adalah langkah penting untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan.

Stigma dan Diskriminasi Stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dapat diatasi melalui kampanye sosialisasi dan edukasi. Konselor memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua, tentang pentingnya pendidikan inklusi. Oliver (1990) menyoroti bahwa perubahan persepsi terhadap penyandang disabilitas memerlukan pendekatan berbasis advokasi dan inklusi sosial. Program intervensi yang dirancang konselor juga dapat membantu mengurangi diskriminasi.

Peran Kebijakan Dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti regulasi yang jelas dan bantuan finansial, membuka peluang besar untuk memperkuat pendidikan inklusi. Evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan ini diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Ainscow, Booth, dan Dyson (2006) menekankan pentingnya kebijakan inklusi yang dirancang untuk mendukung kolaborasi antarsektor. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat mempercepat pencapaian tujuan inklusi.

Kolaborasi Multidisipliner Kolaborasi antara konselor, guru, psikolog, dan profesional lainnya memberikan dampak positif dalam mendukung peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan bekerja sama, para profesional dapat merancang dan menerapkan strategi yang lebih komprehensif. Bronfenbrenner (1979) menggarisbawahi bahwa pendekatan ekologi yang melibatkan berbagai sistem sosial dapat menciptakan dukungan holistik bagi individu.

Peluang Pengembangan Program Bimbingan Pengembangan program bimbingan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan berbagai latar belakang merupakan peluang yang menjanjikan. Program ini dapat mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademis. Boucher dan Kahn (2019) menyatakan bahwa program bimbingan berbasis inklusi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Menurut Tahsinia & Pujiaty (2024), kebijakan yang melibatkan pelatihan nasional bagi guru dan konselor serta kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci dalam menciptakan pendidikan inklusi yang efektif.

## **Kesimpulan**

Pendidikan inklusi menghadirkan tantangan berupa kurangnya pelatihan khusus bagi konselor, keterbatasan sumber daya seperti fasilitas fisik dan teknologi asistif, serta stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang menghambat efektivitas layanan bimbingan konseling (BK). Namun, peluang besar

dapat dimanfaatkan melalui pengembangan program bimbingan berbasis inklusi yang mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademis, serta peningkatan keterlibatan siswa. Penguatan kebijakan inklusi dengan pelatihan nasional bagi guru dan konselor, kolaborasi lintas sektor, serta investasi dalam fasilitas ramah disabilitas dan kampanye edukasi publik adalah langkah strategis untuk menciptakan program BK yang efektif dan inklusif. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, pendidikan inklusi dapat menjadi model yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik.

Untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling sehingga merekomendasikan pemerintah dan sekolah untuk berinvestasi dalam penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Ini termasuk ruang konseling yang aksesibel, alat bantu belajar, serta dukungan anggaran untuk pelatihan konselor dan pengadaan alat pendukung.

## Pengakuan

Terima kasih kepada STKIP ANDI MATAPPA atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan kajian literatur ini. Terima kasih juga kepada bapak Ahmad Yusuf, S.Pd., M.Pd selaku kepala program studi Bimbingan dan Konseling juga sebagai dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Inklusif atas bimbingan dan masukan yang membantu penyempurnaan artikel ini. Kami juga menghargai kontribusi para akademisi dan peneliti yang telah menjadi sumber referensi dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi para peneliti sebelumnya, kajian ini tidak akan mempunyai pondasi ilmiah yang kuat. Selain itu kami ingin menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sejawat atas diskusi yang bermanfaat serta masukan yang berharga dalam proses penyusunan artikel ini. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian jurnal literatur review ini.

## Referensi

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.
- Boucher, M., & Kahn, L. (2019). *Inclusive educational programs and guidance counseling*. *Educational Leadership*, 35(4), 22-27.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Dewi, A. (2024). *Tantangan dan peluang dalam pendidikan inklusi di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 9(1), 10-18.
- Friend, M., & Bursuck, W. D. (2019). *Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers*. Pearson Education.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and managing your school guidance program*. American Counseling Association.
- Indayani, R. (2020). *Pendidikan inklusi: Tantangan dan peluang dalam layanan bimbingan konseling*. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 15(2), 45-59.



Oliver, M. (1990). *The politics of disability: A sociological perspective*. Macmillan Education.

Risalul Ummah, A. (2023). *Teknologi informasi dalam mendukung bimbingan konseling di sekolah inklusi*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(3), 32-40.

Salvia, J., Ysseldyke, J. E., & Witmer, S. E. (2012). *Assessment in special and inclusive education*. Cengage Learning.

Tahsinia, M., & Pujiaty, T. (2024). *Peran kebijakan pendidikan inklusi dalam pengembangan bimbingan konseling*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 50-60.